

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP *RESCHEDULE* CICILAN  
(Studi Kasus Di Koperasi Kredit Mekar Sai Bandar Lampung)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana S1 Dalam Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:  
**Rizky Segi Indrawan**  
**NPM : 1621030251**

**Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**



**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1442 H / 2021 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP *RESCHEDULE* CICILAN  
(Studi Kasus Di Koperasi Kredit Mekar Sai Bandar Lampung)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana S1 Dalam Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:  
**Rizky Segi Indrawan**  
**NPM : 1621030251**

**Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**



**Pembimbing I : Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.**

**Pembimbing II : Marwin, S.H., M.H.**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1442 H / 2021 M**

## ABSTRAK

Koperasi merupakan bagian tak terpisahkan dari perjuangan membangun sistem perekonomian sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Salah satu jasa Koperasi yang sangat dikenal oleh pelaku sector usaha mikro adalah kredit atau pemberian pinjaman dana kepada masyarakat. Bank atau koperasi selaku pemberi fasilitas kredit tugasnya tidak hanya sekedar melakukan penandatanganan perjanjian kredit dan menagih pembayaran angsuran kepada debiturnya tetapi juga memberikan bimbingan dan pengarahan, hal itu agar usaha nasabah berhasil sehingga dapat mengembalikan hutangnya dengan lancar. Permasalahan yang terjadi pada Koperasi Kredit Mekar Sai Bandar Lampung yaitu pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan yang tidak menepati jadwal angsuran, dan pembiayaan yang memiliki potensi menunggak dalam satu waktu tertentu. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana praktik *reschedule* cicilan di KSP Koperasi Kredit Mekar Sai Bandar Lampung?, dan 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap *reschedule* cicilan di KSP Koperasi Kredit Mekar Sai Bandar Lampung?. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui praktik *reschedule* cicilan di KSP Koperasi Kredit Mekar Sai Bandar Lampung, dan 2) Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap *reschedule* cicilan di KSP Koperasi Kredit Mekar Sai Bandar Lampung. Metode penelitian ini adalah penelitian lapangan, yang bersifat deskriptif *analisis*, dengan sumber data yaitu data primer yang diperoleh dari wawancara kepada karyawan dan anggota Koperasi Kopr dit Mekar Sai Bandar Lampung, data sekunder yang diperoleh dari buku-buku yang relevan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan dan anggota KSP Koperasi Kredit Mekar Sai Bandar Lampung yang berhubungan dengan *reschedule* cicilan. Analisis dengan melakukan analisis kualitatif menggunakan metode cara berfikir *induktif*. Hasil penelitian telah diperoleh bahwa bentuk akad *rescheduling* pada pembiayaan cicilan Di KSP Kopr dit Mekar Sai Bandar Lampung tetap menggunakan akad biaya cicilan yaitu pihak KSP tidak merubah akad hanya memperbaharui akad yang lama dengan akad yang baru karena nasabah hanya meminta perpanjangan jangka waktu dan perubahan jumlah cicilan atau angsuran untuk pelunasan pembiayaan cicilan tanpa menambah jumlah pembiayaannya. Dalam tinjauan hukum Islam mekanisme restrukturisasi pada pembiayaan cicilan dengan cara penjadwalan kembali (*reschudeling*) yaitu memberikan jangka waktu pelunasan dan perubahan cicilan itu diperbolehkan karena sesuai dengan surah al-Baqarah (2) ayat 280 dan juga selaras dengan fatwa DSN No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali tagihan cicilan.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizky Segal Indrawan  
NPM : 1621030251  
Jurusan/prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP RESCHEDULE CICILAN (Studi Kasus Di KSP Kopdit Mekar Sai Bandar Lampung)"** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 26 November 2020

Penulis,



Rizky Segal Indrawan

NPM 1621030251





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

**Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp ( 0721 ) 703289**

**PERSETUJUAN**

Tim pembimbing setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan  
secukupnya, maka skripsi saudara :

**Nama : RIZKY SEGA INDRAWAN**

**Npm : 1621030251**

**Fakultas : Syariah**

**Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

**Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP RESCHEDULE  
CICILAN (Studi Kasus Di Koperasi Kredit Mekar Sai Bandar  
Lampung)**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqasahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqasah  
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.**

**NIP. 197111061998032005**

**Marwin, S.H., M.H.**

**NIP. 197501292000031001**

**Mengetahui  
Ketua Jurusan Muamalah**

**Khoiruddin, M.S.I**

**NIP. 197807252009121002**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

**Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp ( 0721 ) 703289**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP RESCHEDULE CICILAN (Studi Kasus Di Koperasi Kredit Mekar Sai Bandar Lampung)”** disusun oleh **RIZKY SEGA INDRAWAN, NPM: 1621030251,** Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Telah di Ujikan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan pada Hari/Tanggal: Jum'at, 08 Januari 2021.

**TIM MUNAQSAH**

Ketua : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H.

Sekretaris : Arif Fikri, S.H.I., M.Ag.

Penguji I : Dr. H. Jayusman, M.Ag.

Penguji II : Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.

Penguji III : Marwin, S.H., M.H.

**Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah**



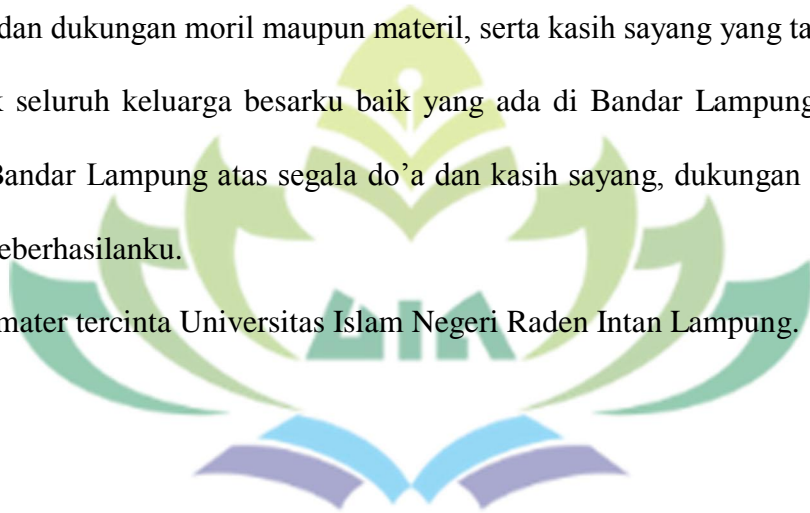
**H. Khairuddin, M.H.  
NIP. 196210221993031002**



## **PERSEMBAHAN**

Skripsi sederhana ini dipersembahkan dan didedikasikan sebagai bentuk ungkapan rasa syukur, tanda cinta dan kasih sayang, serta hormat yang tak terhingga kepada:

1. Untuk Ayahku dan Mamaku tercinta, terima kasih atas segala jasa, pengorbanan, do'a, motivasi, dukungan moril dan materil serta curahan kasih sayang yang tak terhingga, sehingga dengan upayaku bisa membuat ayah dan mama bangga.
2. Untuk Saudara-Saudaraku tercinta, yang sudah memberi dorongan semangat, do'a, dan dukungan moril maupun materil, serta kasih sayang yang tak terhingga.
3. Untuk seluruh keluarga besarku baik yang ada di Bandar Lampung, maupun di luar Bandar Lampung atas segala do'a dan kasih sayang, dukungan dan motivasi atas keberhasilanku.
4. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



## MOTTO

وَاللَّهُ كَثِيرٌ أَوْعَا فَا لَهُ رَفِيضٌ عِفَهُ، حَسَنًا قَرَضًا اللَّهُ يُقْرِضُ الَّذِي ذَا مَنِّ

تَرْجَعُونَ وَإِلَيْهِ وَيَبْصُطُ يَقْبِضُ

Artinya: “Siapakah yang mau member pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.”





## RIWAYAT HIDUP

Rizky Segi Indrawan lahir Bandar Lampung pada tanggal 04 Februari 1998, anak pertama dari dua saudara Dari buah cinta kasih dari pasangan Bapak Mujain dan Ibu Sri Susilowati. Adapun pendidikan yang telah ditempuh ialah:

1. TK Beringin Raya Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung pada tahun 2003 dan selesai tahun 2004
2. SD Negeri 1 Beringin Raya, Kemiling Bandar Lampung pada tahun 2004 dan selesai pada tahun 2010
3. SMP Negeri 23 Pahoman, Bandar Lampung pada tahun 2010 dan selesai pada tahun 2013
4. SMA Negeri 5 Bandar Lampung pada tahun 2013 dan selesai tahun 2016
5. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, mengambil program studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah) di Fakultas Syari'ah pada tahun 2016 dan selesai pada tahun 2021.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Puji syukur kehadiran Allah swt yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya, sehingga skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP RESCHEDULE CICILAN (Studi Kasus Di Koperasi Kredit Mekar Sai Bandar Lampung)”** dapat terselesaikan. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad saw, keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.

Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Syari'ah.

Atas bantuan semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa penulis haturkan terima kasih sebesar-besarnya dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terlihat dalam penulisan skripsi ini. Secara khusus penulis ucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Moh Mukri, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini.
2. Dr. H. Khairuddin Tahmid, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini.



3. Khoiruddin, M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dan Juhratul Khulwah, M.S.I. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang senantiasa membantu dan memberikan bimbingan serta arahan terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswanya.
4. Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H. selaku Pembimbing I dan Marwin, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang selalu memberikan masukan, saran, serta meluangkan waktunya untuk senantiasa memberikan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Bapak/Ibu Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah banyak membantu selama masa perkuliahan.
6. Kepala beserta staf perpustakaan pusat dan perpustakaan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kemudahan dalam menyediakan referensi yang dibutuhkan.
7. Guru-guruku tercinta dari Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Atas yang telah mengajarkanku banyak hal sehingga dapat membaca, menulis dan mengetahui banyak hal hingga dapat masuk di perguruan tinggi ini.
8. Teman-teman seperjuangan angkatan 2016, khususnya para sahabat dan keluarga besar Muamalah C angkatan 2016, yang telah membantu dan memotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini, serta memberikan warna, canda tawa dan berbagai pengalaman selama empat tahun masa perkuliahan.
12. Almamater tercintaku Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Semoga bantuan serta segalanya yang telah diberikan oleh semua pihak mendapatkan balasan yang berlipat serta pahala dari Yang Maha Kuasa Allah swt.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Bandar lampung, 26 Februari 2021

**RIZKY SEGA INDRAWAN**  
**NPM. 1621030251**





## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	3
C. Latar Belakang Masalah .....	3
D. Fokus Penelitian.....	8
E. Rumusan Masalah.....	8
F. Tujuan Penelitian .....	8
G. Signifikasi/Manfaat Penelitian.....	8
H. Metode Penelitian .....	9
<b>BAB II: KAJIAAN TEORI.....</b>	<b>15</b>
A. Kajian Teori .....	15
1. Akad Dalam Islam .....	15
a. Pengertian Akad.....	16
b. Dasar Hukum Akad .....	17
c. Rukun dan Syarat Akad .....	17
d. Perubahan Akad .....	19
e. Wanprestasi Akad Dalam Hukum Islam .....	20
f. Berakhirnya Akad .....	22
2. Akad <i>Murabahah</i> .....	23
a. Pengertian <i>Murabahah</i> .....	23
b. Syarat dan Rukun <i>Murabahah</i> .....	27
c. Perubahan Dalam Akad <i>Murabahah</i> .....	31
d. Berakhirnya Akad <i>Murabahah</i> .....	34
e. Wanprestasi.....	34
3. <i>Tahawwul Al-Aqd</i> dan Cicilan/Kredit Dalam Hukum Islam .....	36
a. Pengertian <i>Tahawwul Al-Aqd</i> .....	36
b. Pertimbangan Munculnya Fatwa .....	36
c. Dasar Hukum .....	39
4. Restrukturisasi Pembiayaan .....	39
B. Tinjauan Pustaka.....	45

### **BAB III : DESKRIPSI DATA PENELITIAN..... 48**

A. Gambaran Umum KSP Koperasi Kredit Mekar Sai Bandar Lampung.....	48
B. Produk Simpanan .....	49
1. Simpanan Saham.....	50
2. Simpanan Non Saham.....	51
3. Simpanan Berbunga Bulanan.....	54
C. Standar Pagu Pinjaman .....	54
1. Jenis Dan Batasan Maksimal Pinjaman .....	54
2. Pinjaman Khusus.....	55
3. Pinjaman Mikro.....	55
4. Pertimbangan Keputusan Pinjaman .....	55
D. Standar Biaya Pinjaman .....	55
1. Penetapan Biaya Pinjaman .....	56
2. Bunga Pinjaman.....	56
3. Tingkat Bunga Pinjaman .....	56
4. Setoran Angsuran Pokok Dan Bunga Pinjaman .....	56
E. Standar Agunan .....	56
F. Syarat agar Dapat <i>Rescheduling</i> .....	57
G. Cara Cerdas Mengantisipasi Hutang agar Tak Perlu Di <i>Rescheduling</i> .....	58
H. Prestasi dan Penghargaan yang diraih oleh KSP Koperasi Kredi Mekar Sai.....	59
I. Penyelesaian Cicilan di Koperasi Kredit Mekar Sai Bandar Lampung .....	59

### **BAB IV : ANALISA PENELITIAN.....65**

A. Analisis Terhadap <i>Reschedule</i> Cicilan Di KSP Koperasi Kredit Mekar Sai Bandar Lampung .....	65
B. Analisis Terhadap Bentuk Akad <i>Reschedule</i> Cicilan Di KSP Koperasi Kredit Mekar Sai Bandar Lampung .....	67
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap <i>Reschedule</i> Cicilan Di KSP Koperasi Kredit Mekar Sai Bandar Lampung .....	69

### **BAB V : PENUTUP .....74**

A. Kesimpulan .....	74
B. Rekomendasi .....	74

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Penegasan Judul**

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul skripsi maka akan diuraikan secara singkat kata kunci yang terdapat di dalam judul skripsi “**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP *RESCHEDULE* CICILAN Studi Kasus Di Koperasi Kredit Mekar Sai Bandar Lampung**”. Adapun istilah-istilah tersebut adalah sebagai berikut :

#### **1. Tinjauan**

Tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dsb).<sup>1</sup>

#### **2. Hukum Islam**

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa hukum Islam adalah hukum yang berdasarkan wahyu Allah. Dengan demikian hukum Islam menurut ta’rif ini mencakup hukum syara’ dan juga mencakup hukum fiqh, karena arti syara’ dan fiqh terkandung di dalamnya.<sup>2</sup>

Hukum Islam mengacu pada pandangan hukum yang bersifat teologis. Artinya hukum Islam diciptakan karena ia mempunyai tujuan.

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Cetakan Keempat, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 1470

<sup>2</sup> Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), h. 17-18

Tujuan dari adanya hukum Islam adalah terciptanya kedamaian di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Inilah yang membedakannya dengan hukum manusia yang menghendaki kedamaian dunia saja.<sup>3</sup>

### 3. *Reschedule*

*Reschedule* yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah,<sup>4</sup> yaitu suatu tindakan untuk memperpanjang jadwal cicilan pokok kredit. Penjadwalan kembali dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu kredit atau jangka waktu angsuran kredit.<sup>5</sup>

### 4. Cicilan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Angsuran yaitu uang yang dipakai untuk mengangsur atau cicilan. Angsuran adalah uang yang dipakai untuk diserahkan sedikit demi sedikit atau tidak sekaligus, seperti untuk pembayaran hutang, pajak dan sebagainya.<sup>6</sup>

### 5. Koperasi Kredit Mekar Sai

Koperasi Kredit Mekar Sai adalah salah satu koperasi konvensional yang terdapat di Jl. Ir Juanda No. 74, pahoman Bandar Lampung, Lampung. Koperasi ini bergerak dalam bidang simpan pinjam yang mempunyai nasabah dari berbagai kalangan. Didirikan pada tanggal 27 Januari 1992, lahir dari keprihatinan dan kesejahteraan masyarakat.

---

<sup>3</sup>Muhammad Syukri Albani, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 57.

<sup>4</sup>Wangsawidjaya, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta :Gramedia Pustaka Utama 2012), h. 448.

<sup>5</sup>Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Risiko* (Jakarta :Gramedia Pustaka Utama, 2015), h. 98.

<sup>6</sup><http://eprints.walisongo.ac.id/7244/3/BAB%20II.pdf>, diakses pada 20 februari 2020 pukul 15.30 WIB.



## B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan memilih dan menentukan judul Skripsi ini antara lain sebagai berikut :

### 1. Secara Objektif

Mengingat perkembangan zaman yang demikian pesat maka persoalan muamalah juga berkembang, sehingga perlu memahami dengan benar sistem pinjaman atau kredit pada zaman sekarang ini, lebih spesifikasinya tentang *Reschedule* Cicilan yang terjadi pada Koperasi Kredit Mekar Sai Bandar Lampung, yang mana pada Koperasi tersebut menjadi salah satu tempat yang dituju oleh masyarakat Bandar Lampung.

### 2. Secara Subjektif

Ditinjau dari aspek bahasan, kajian judul skripsi ini sesuai dengan disiplin ilmu yang telah dipelajari dalam bidang Muamalah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung serta didukung oleh tersedianya data-data dan literatur yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini.

## C. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan ada 2 jenis yaitu lembaga keuangan bank dan bukan bank.<sup>7</sup> Lembaga keuangan bank dan bukan bank bertindak sebagai lembaga yang menyediakan jasa keuangan bagi nasabah dan lembaga keuangan inilah yang memfasilitasi peredaran uang dalam perekonomian, dimana uang dari investor dikumpulkan dalam bentuk pinjaman uang kepada yang

---

<sup>7</sup>Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), h.3.

membutuhkan. Lembaga keuangan yang ada, terdapat salah satu lembaga yang mampu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh ekonomi lemah yaitu Koperasi.<sup>8</sup>

Koperasi merupakan bagian tak terpisahkan dari perjuangan membangun sistem perekonomian sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Adapun dalam menjalankan kegiatannya, koperasi memainkan peranan yang sangat penting bagi terwujudnya sistem perekonomian yang menjamin pemerataan hasil-hasil pembangunan, baik bagi orang-orang yang menjadi 1 anggota koperasi maupun bagi anggota masyarakat pada umumnya.<sup>9</sup>

Partisipasi para anggota sangat berpengaruh dan menentukan keberhasilan koperasi, karena partisipasi anggota merupakan unsur terpenting dan paling utama dalam mencapai keberhasilan koperasi. Secara umum, berdasar jenis usaha, koperasi terdiri atas Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Koperasi Serba Usaha (KSU), Koperasi Konsumen dan Koperasi Produksi. Sedangkan berdasar keanggotaannya Koperasi Unit Desa (KUD), Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI), Koperasi Sekolah dan Koperasi Mahasiswa<sup>10</sup>.

Salah satu jasa Koperasi yang sangat dikenal oleh pelaku sector usaha mikro adalah kredit atau pemberian pinjaman dana kepada masyarakat. Bank atau koperasi selaku pemberi fasilitas kredit tugasnya tidak hanya sekedar melakukan penandatanganan perjanjian kredit dan menagih pembayaran angsuran kepada debiturnya tetapi juga memberikan bimbingan dan

---

<sup>8</sup>*Ibid*, h.3.

<sup>9</sup>Revrison Baswir, *Koperasi Indonesia Edisi Pertama*, (Yogyakarta : BPFE-Yogyakarta, 2012), h. 9.

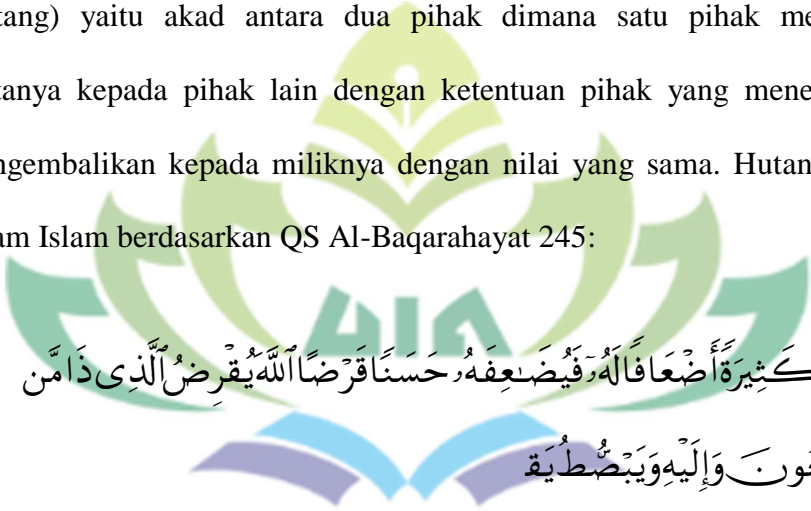
<sup>10</sup>*Ibid*, h. 3.

<sup>13</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Ponorogo: CV Penerbit, 2010), h. 189.



Kegiatan koperasi juga telah diatur oleh Pemerintah dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam yaitu *“Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam.”*<sup>14</sup> Koperasi Simpan Pinjam (KSP) merupakan koperasi yang mempunyai kegiatan usaha mendapatkan dana dari anggota koperasi dan menyalurkannya kembali untuk kepentingan anggota koperasi melalui sistem simpan pinjam.

Pinjaman uang dalam hukum Islam diartikan sebagai *Qardh* (Hutang Piutang) yaitu akad antara dua pihak dimana satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain dengan ketentuan pihak yang menerima harta mengembalikan kepada miliknya dengan nilai yang sama. Hutang piutang dalam Islam berdasarkan QS Al-Baqarah ayat 245:



بِضْ وَأَلَّهِ كَثِيرَةً أَضْعَافًا لَهُ، فَيُضْعِفُهُ، حَسَنًا قَرْضًا أَلَّهِ يَقْرِضُ الَّذِي ذَا مَن  
تُرْجَعُونَ وَإِلَيْهِ وَيَبْضُ طَيْقَ

Artinya: *“Siapakah yang mau member pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.”*<sup>15</sup>

Pembayaran atas pinjaman anggota Koperasi Simpan Pinjam, pada dasarnya sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat sesuai dengan waktu

<sup>14</sup>Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1995, Pasal 1.

<sup>15</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Ponorogo: CV Penerbit, 2010), h. 144.

yang ditetapkan atau disepakati, pembayaran dari pinjaman tersebut dilakukan dengan mengangsur setiap bulan sebagaimana disebutkan dalam perjanjian pembiayaan atau peminjaman. Adapun pada saat mengangsur pembayaran pembiayaan atau peminjaman tersebut, adakalanya anggota mengalami kendala pembayaran sehingga angsuran yang harusnya ia bayar setiap bulan menjadi terlambat. Beberapa permasalahan yang terjadi dalam perjanjian pinjaman dana antara lain terjadi karena pembayaran dana tersebut berjalan tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, kurang lancar, bahkan macet sama sekali sehingga merugikan koperasi selaku pemberi pinjaman.<sup>16</sup>

Permasalahan yang terjadi pada Koperasi Kredit Mekar Sai Bandar Lampung yaitu pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan yang tidak menepati jadwal angsuran, dan pembiayaan yang memiliki potensi menunggak dalam satu waktu tertentu. Apabila terdapat nasabah yang macet dalam melakukan pembayaran, pihak Koperasi akan memberikan dispensasi waktu jika nasabah memang belum memiliki uang untuk membayar angsuran.

Berdasarkan uraian atas makaperlu untuk diadakan penelitian yang lebih jelas mengenai sistem *Reschedule* Cicilan yang terjadi di Koperasi Kredit Mekar Sai, juga untuk dapat memberikan pemahaman serta membantu meringankan kekhawatiran kepadanasabah. Penelitian ini berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Reschedule* Cicilan (Studi di Koperasi Kredit Mekar Sai Bandar Lampung)”**.

---

<sup>16</sup> Rosita Indriyati, “Aspek Hukum Pemberian Pinjaman Oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi Pada Calon Anggota Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995”, Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa 2013, h.7.

#### **D. Fokus Penelitian**

Adapun fokus penelitian ini sebagai berikut:

1. Fokus penelitian adalah Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Reschedule* Cicilan atau Kredit.
2. Kajian penelitian ini dibatasi hanya dalam lingkup di Koperasi Kredit Mekar Sai Bandar Lampung

#### **E. Rumusan Masalah**

Adapun Rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik *reschedule* cicilan di KSP Koperasi Kredit Mekar Sai Bandar Lampung?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap *reschedule* cicilan di KSP Koperasi Kredit Mekar Sai Bandar Lampung?

#### **F. Tujuan Penelitian**

Adapun Tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui praktik *reschedule* cicilan di KSP Koperasi Kredit Mekar Sai Bandar Lampung.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap *reschedule* cicilan di KSP Koperasi Kredit Mekar Sai Bandar Lampung.

#### **G. Signifikasi Penelitian/Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ilmiah ini diharapkan dapat menjadi sumbangan ilmu pengetahuan dan memberikan manfaat bagi semua pihak khususnya bagi para akademisi yang ingin mengetahui lebih banyak mengenai bentuk



kegiatan lain yang diindikasikan memiliki kemiripan dengan taruhan yang ada dalam kehidupan sehari-hari.

## 2. Manfaat Praktisi

- a. Bagi penulis, diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan tentang akad, dan cicilan/kredit
- b. Bagi KSP Koperasi Kredit Mekar Sai Bandar Lampung, diharapkan memberikan kebijakan yang lebih agar tidak terjadi hal yang merugikan suatu pihak, sehingga dapat meningkatkan kemajuan KSP Koperasi Kredit Mekar Sai Bandar Lampung.

## H. Metode Penelitian

Metode yang digunakan penelitian ini merupakan metode kualitatif. Alasannya karena penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, serta proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Penggunaan metode tersebut akan disebarkan sebagai berikut:

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian lapangan (*Field research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau di responden.<sup>17</sup> Yaitu melakukan penelitian lapangan untuk memperoleh data atau informasi secara sebagai pendukung penelitian, dimana peneliti ingin mengetahui fenomena tinjauan hukum Islam

---

<sup>17</sup>Susiadi, *Metode Penelitian*, (Lampung; Pusat Penelitian dan Penertiban LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h. 9

terhadap *reschedule* cicilan pada Koperasi Kredit Mekar Sai Bandar Lampung.

#### b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis secara bertahap dan berlapis dengan kualitatif, bersifat deskriptif adalah penelitian yang bertujuan menyelidiki keadaan atau hal lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang saat ini terjadi.<sup>18</sup> Penelitian ini yang menjelaskan atau menggambarkan secara tepat mengenai bagaimana tinjauan hukum islam terhadap *reschedule* cicilan pada Koperasi kredit Mekar Sai Bandar Lampung.

## 2. Sumber Data Penelitian

Fokus penelitian ini lebih pada persoalan penentuan Hukum terhadap *reschedule* Cicilan pada Koperasi KSP Koperasi Kredit Mekar Sai Bandar Lampung. Oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama (biasanya dapat melalui wawancara, angket, pendapat dan lain-lain).<sup>19</sup> Hal ini data primer diperoleh bersumber dari pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan praktik *Reschedule* Cicilan di KSP Koperasi Kredit Mekar Sai Bandar Lampung, data primer ini

<sup>18</sup>Moh Pabundu Tika, *Metodelogi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Angkasa, 2006), h. 10

<sup>19</sup>Sedarmayanti, Syarifudin Hidayat, *Metodelogi Penelitian* (Bandung: Mandar Maju, 2002), h.73

berupa jawaban-jawaban atas pertanyaan dari peneliti/hasil wawancara berdasarkan jawaban masing-masing informan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder yang diperoleh peneliti dari buku-buku yang membicarakan topik yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan judul dan pokok bahasan kajian ini akan tetapi mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji.<sup>20</sup>

### 3. Metode Pengumpulan Data

Adapun dalam usaha pengumpulan data untuk penelitian ini, digunakan beberapa metode, yaitu;

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengamati sesuatu melalui pengamatan terhadap suatu objek penelitian secara langsung tanpa ada pertolongan standar lain untuk keperluan tersebut.<sup>21</sup> Observasi dilakukan secara langsung fenomena yang terjadi di lapangan.

b. Wawancara

Metode wawancara adalah teknik pengumpulan data untuk memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara

---

<sup>20</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2008), h.137

<sup>21</sup>Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), h. 154



mengajukan suatu pertanyaan langsung kepada pihak yang bersangkutan. Praktisnya penulis menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan secara langsung yang terjadi pada praktik *reschedule* cicilan di KSP Koperasi Kredit Mekar Sai Bandar Lampung.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger agenda dan sebagainya.<sup>22</sup> Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa struktur organisasi serta peran dan tugas dari masing-masing karyawan Koperasi Kredit Mekar Sai Bandar Lampung.

#### 4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari atas: obyek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi dari penelitian ini adalah sebagian nasabah di Koperasi Kredit Mekar Sai Bandar Lampung serta beberapa anggota karyawan dari Koperasi Kredit Mekar Sai Bandar Lampung.

---

<sup>22</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 114.

b. Sampel

Sampel adalah bagian suatu subjek atau objek yang mewakili populasi.<sup>23</sup> Menurut Suharsimi Arikunto, sebagai perkiraan apabila subjek kurang dari 100 maka lebih baik diambil semua, sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi, jika subjek besar maka diambil 10-15% atau 20-25%. Sampel yang diambil oleh penulis adalah sebanyak 12% dari jumlah populasi yaitu 3 nasabah dan 7 anggota karyawan Koperasi Kredit Mekar Sai Bandar Lampung. Jadi sampel dari populasi penelitian ini berjumlah 10 orang.

## 5. Metode Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul kemudian diolah, pengolahan data dilakukan dengan cara:

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Editing yaitu pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan data lain

b. Sistematikasi data (*Systematizing*)

Sistematika data yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

## 6. Metode Analisa Data

---

<sup>23</sup>Radial, *Paradigma Dan Model Penelitian Komunikasi* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), h. 336.

Setelah data terkumpul, selanjutnya data tersebut akan dianalisis dengan menggunakan kualitatif melalui cara berfikir Induktif. Metode induktif yaitu dari fakta-fakta yang sifatnya khusus atau peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian dari fakta tersebut ditarik kesimpulan yang bersifat umum.<sup>24</sup> Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan *Reschedule* Cicilan yang ada di Koperasi Kredit Mekar Sai.



---

<sup>24</sup>Margono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Renika Cipta, 2015), h. 182.

## BAB II KAJIAN TEORI

### A. Kajian Teori

#### 1. Akad Dalam Islam

##### a. Pengertian Akad

Lafad akad berasal dari bahasa Arab *al-‘aqd* yang artinya perikatan, perjanjian dan mufakat. Menurut bahasa *aqad* mempunyai beberapa arti antara lain:

##### 1) Mengikat

الرَّبْطُ : وَهُوَ جَمْعُ طَرَفَيْ حَبْلَيْنِ وَيُشَدُّ أَحَدُهُمَا بِالْآخَرِ حَتَّى يَتَّصِلَا  
فَيُصْبِحَا كَقِطْعَةٍ وَاحِدَةٍ

*“Rabath (mengikat) yaitu: mengumpulkan dua tepi tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain hingga tersambung, lalu keduanya menjadi sebagai sepotong benda”.*

##### 2) Sambungan

الْمَوْصِلُ الَّذِي يُمَسِكُهُمَا وَيُوثِقُهُمَا

*“Sambungan yang memegang kedua tepi itu dan mengikatkannya”<sup>2526</sup>*

##### 3) Janji

---

<sup>25</sup>Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Jakarta : PT Bulan Bintang, 1989), h. 21



1) Secara Umum

## 2) Secara Khusus

## b. Dasar Hukum Akad

يَدِ مُحَلٍّ غَيْرِ عَلَيْكُمْ يُتْلَى مَا إِلَّا لَأَنْتُمْ بِمَعْرِفَةِكُمْ أَجَلَتْ بِالْعُقُودِ أَوْ فُؤَاءِ أَمْنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا

﴿يُرِيدُ مَا خَلَقَكُمْ اللَّهُ إِنْ حُرِّمَ وَأَنْتُمْ الصَّ

<sup>27</sup> Rachmat Syaife'I, *Fiqih Muamalah*, (Bandung.: Pustaka Setia, 2004), h. 43-44

<sup>28</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qura'an dan Terjemah*, (Surabaya : Surya Cipta Aksara, 1980), h. 156

Surah Al-Imran (3) Ayat 76 :

﴿الْمُتَّقِينَ يُحِبُّ اللَّهُ فَإِنْ وَاتَّقَىٰ بَعْدَهُ أَوْفَىٰ مَنْ بَلَىٰ﴾

*“(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat) nya [207] dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.”<sup>29</sup>*

### c. Rukun Dan Syarat Akad

#### 1) Rukun-Rukun Akad

- a) *Aqid* (orang yang berakad) terkadang masing-masing pihak terdiri dari seorang saja, dan kadangkala dari beberapa orang.
- b) *Ma'qud Alayh* (sesuatu yang diakadkan) adalah benda yang menjadi obyek akad.
- c) *Shigat Al-aqd*, yaitu ijab dan qabul (ucapan yang menunjukkan kehendak kedua belah pihak).<sup>30</sup>

#### 2) Syarat-Syarat Akad

Ada beberapa macam syarat akad yaitu syarat terjadinya akad, syarat sah, syarat pelaksanaan dan syarat kepastian.

##### a) Syarat Terjadinya Akad

<sup>29</sup>*Ibid.*, h.88

<sup>30</sup>Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDIT), *Briefcase Book Edukasi Profesional Syari'ah* “Cara Mudah Memahami Akad-Akad Syari'ah” (Jakarta: Renaisan, 2005), h. 14

Syarat terjadinya akad adalah segala sesuatu yang disyaratkan untuk terjadinya akad secara syara'. Jika tidak memenuhi syarat tersebut, maka akad menjadi batal.

Syarat ini terbagi atas dua bagian:

- (1) Umum, yakni syarat-syarat yang harus ada pada setiap akad
- (2) Khusus, yakni syarat-syarat yang harus ada pada sebagian akad, dan tidak disyaratkan pada bagian lainnya.

b) Syarat Sah Akad

Syarat sah akad adalah segala sesuatu yang disyaratkan syara' untuk menjamin dampak keabsahan akad. Jika tidak terpenuhi, akad tersebut rusak.

c) Syarat Pelaksanaan Akad

Dalam pelaksanaan akad, ada dua syarat yaitu kepemilikan dan kekuasaan. Kepemilikan adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang sehingga ia bebas beraktivitas dengan apa-apa yang dimilikinya sesuai dengan aturan syara'. Adapun kekuasaan adalah kemampuan seseorang dalam bertasharuf sesuai dengan ketentuan syara', baik secara asli, yakni dilakukan oleh dirinya, maupun sebagai penggantian (menjadi wakil seseorang). Dalam hal ini disyaratkan antara lain:

- (1) Barang yang dijadikan akad harus kepunyaan orang yang berakad, jika dijadikan, maka sangat bergantung kepada izin pemiliknya yang asli.
- (2) Barang yang dijadikan tidak berkaitan dengan kepemilikan orang lain.

#### **d. Perubahan Akad**

Berkaitan dengan sifat akad sebagai akad yang bersifat amanah, yang imbalannya hanya mengharap *ridho* dari Allah Swt, para ulama fiqh juga membahas kemungkinan perubahan sifat akad dari sifat amanah menjadi sifat *adh-dhaman* (ganti rugi). Para ulama fiqh mengemukakan beberapa kemungkinan tentang hal ini, antara lain:

- 1) Barang itu tidak dipelihara oleh orang yang dititipi. Apabila seseorang merusak barang itu dan orang yang dititipi tidak berusaha mencegahnya, padahal ia mampu, maka ia dianggap melakukan kesalahan, karena memelihara barang itu merupakan kewajiban baginya. Atas kesalahan ini ia dikenakan ganti rugi (*adh-dhaman*).
- 2) Uang itu dititipkan oleh pihak kedua kepada orang lain (pihak ketiga) yang bukan keluarga dekat dan bukan pula menjadi tanggung jawabnya. Apabila uang itu hilang atau rusak, dalam kasus seperti ini orang yang dititipi dikenakan ganti rugi

- 3) Uang itu dimanfaatkan oleh orang yang dititipi. Dalam kaitan ini para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa apabila orang yang dititipi barang itu menggunakan barang titipan dan setelah ia gunakan barang itu kemudian rusak, maka orang yang dititipi wajib membayar ganti rugi.
- 4) Orang yang dititipi uang mengingkari. Apabila pemilik barang meminta kembali barang titipannya pada orang yang ia titipi, lalu orang yang disebut terakhir itu mengingkarinya atau ia sembunyikan, sedangkan ia mampu untuk mengembalikannya, maka ia dikenakan ganti rugi

**e. Wanprestasi Akad Dalam Hukum Islam**

Dalam suatu perjanjian atau kontrak tentu terdapat dua macam subyek yaitu pihak yang berhutang atau disebut kreditur dan pihak yang memberikan pihutang atau disebut debitur. Kreditur adalah orang yang mempunyai pihutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.

Sedangkan debitur adalah orang yang mempunyai hutang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan. Apabila pihak debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam kontrak/perjanjian, maka ia dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi. Istilah wanprestasi atau yang dalam ranah hukum perdata di Indonesia sering disebut dengan ingkar janji atau cidera



janji berasal dari bahasa Belanda yaitu dari kata ,wan' yang artinya tidak ada, kata ,prestasi'. yang diartikan prestasi/kewajiban.

Jadi wanprestasi berarti prestasi buruk atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan. Selain itu bisa juga diartikan ketiadaan suatu Prestasi. Menurut Pasal 1234 KUH Perdata yang dimaksud dengan prestasi adalah seseorang yang mengerahkan sesuatu. Sebaliknya dianggap wanprestasi atau lalai dalam Pasal 1238 disebutkan : Si berhutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri ialah jika ini menetapkan bahwa si berhutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Abdul Kadir Muhammad dalam bukunya menyatakan bahwa wanprestasi adalah tidak memenuhi kewajiban yang harus ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena Undang-undang. Prof. Subekti, SH menyatakan bahwa wanprestasi seorang debitur dapat berupa empat macam, yaitu :

- 1) Debitur tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya
- 2) Debitur melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan.
- 3) Debitur melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat

- 4) Debitur melaksanakan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

R. Setiawan dalam bukunya menyatakan bahwa pada debitur terletak kewajiban untuk memenuhi prestasi dan jika ia tidak melaksanakan kewajibannya tersebut karena keadaan memaksa (*overmacht*), maka debitur dianggap melakukan ingkar janji. Ada tiga bentuk ingkar janji yaitu :

- 1) Tidak memenuhi prestasi sama sekali. Dalam hal ini debitur dapat segera dituntut ganti rugi tanpa penetapan lalai.
- 2) Terlambat memenuhi prestasi, tanpa penetapan lalai. Debitur dapat dibebani ganti rugi setelah ada ketetapan yang berupa ketentuan waktu pembayaran.
- 3) Memenuhi secara tidak baik (keliru melaksanakan perjanjian). Dalam hal ini Hoge Raad berpendapat seperti yang dikutip R.Setiawan, bahwa jika debitur keliru melaksanakan prestasinya, tidak diperlukan penetapan lalai.

#### **f. Berakhirnya Akad**

Para ulama' fiqh menyatakan bahwa suatu akad dapat berakhir apabila:

- 1) Berakhirnya masa berlaku akad itu, apabila akad itu memiliki tenggang waktu.
- 2) Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat.

- 3) Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir apabila:
  - (a) Jual beli itu fasad, seperti terdapat unsur-unsur tipuan pada salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi.
  - (b) Berlakunya khiyar syarat, khiyar aib, atau khiyar rukyah.
  - (c) Akad yang tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak.
  - (d) Tercapainya tujuan akad itu secara sempurna.
- 4) Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. Dalam hubungan ini, para ulama' fiqh menyatakan bahwa tidak semua akad otomatis berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad. Akad yang bisa berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad, diantaranya adalah akad *al-ijarah* (sewa menyewa), *ar-rahn*, *al-kafalah*, *asy-syirkah*, *al-wakalah* dan *al-muzara'ah*. Akad juga akan berakhir dalam *bai' al-fuduli* (suatu bentuk jual beli yang keabsahan akadnya tergantung pada persetujuan orang lain) apabila tidak mendapat persetujuan dari pemilik modal.<sup>31</sup>

## 2. Akad *Murabahah*

### a. Pengertian *Murabahah*

*Murabahah* didefinisikan oleh para *fuqaha'* sebagai penjualan barang seharga biaya atau harga pokok (*cost*) barang tersebut ditambah *margin* (*mark-up*) keuntungan yang disepakati.

---

<sup>31</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000),

Karakteristik murabahah adalah bahwa penjual harus memberitahu kepada pembeli mengenai harga pembelian produk dan mengatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya (*cost*) tersebut.<sup>32</sup>

Menurut PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) No. 102 tentang akuntansi murabahah dijelaskan bahwa murabahah adalah menjual barang dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengucapkan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli.<sup>33</sup>

Sedangkan *bai' bisaman ajil* adalah pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk membeli suatu barang/jasa dengan kewajiban mengembalikan talangan dana tersebut ditambah margin keuntungan bank secara mencicil sampai lunas dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Bank memperoleh *margin* keuntungan berupa selisih harga beli dari pemasok dengan harga jual bank kepada nasabah.<sup>34</sup>

Jadi, murabahah adalah akad jual beli barang dengan mengatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai atau cicilan. Dalam *murabahah* juga

---

<sup>32</sup>Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, (Yogyakarta : UII Press, 2005), h. 13

<sup>33</sup>PSAK No. 102 *Tentang Akutansi Murabahah*, Jakarta: IAI, 2006) h. 2

<sup>34</sup>Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2006), h. 116

diperkenankan adanya perbedaan dalam harga barang untuk cara pembayaran yang berbeda.

*Murabahah muajjal* dicirikan dengan adanya penyerahan barang diawal akad dan pembayaran kemudian (setelah awal akad) baik dalam bentuk angsuran maupun dalam bentuk *lump sum* (sekaligus).<sup>35</sup>

Pada perjanjian *murabahah*, bank atau dalam hal ini lembaga keuangan membiayai pembelian barang atau *asset* yang dibutuhkan oleh nasabah dengan membeli barang itu dari pemasok barang kemudian menjualnya kepada nasabah tersebut dengan menambahkan suatu keuntungan (*margin*). Dengan kata lain penjualan barang oleh bank kepada nasabah dilakukan atas dasar *cost-plus profit*.<sup>36</sup>

#### 1) Dasar Hukum Murabahah

##### (a) Al-Qur'an

Surah an-Nisa' (4) ayat 29:

﴿بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا أَمْوَالَ الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا  
لَهُمْ أَنْفُسُكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا مِنْكُمْ تَرَا ضٍ عَنْ تِجْرَةٍ تَكُونُ أَنْ إِلَّا  
رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali

<sup>35</sup>Adiwarman, A. Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006) h. 116

<sup>36</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 2005), h. 64



*dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*

Surah al-Baqarah (2) ayat 280:

لَكُمْ خَيْرٌ تَصَدَّقُوا وَأَنْ مَيَّسَرَةٍ إِلَىٰ فَنَظَرَةٍ عُسْرَةٍ ذُو كَانٍ وَإِنْ  
تَعْلَمُونَ كُنْتُمْ إِنْ

*“dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”*

Surah al-Baqarah (2) ayat 283:

أَمْ مِنْ فَاِنْ مَّقْبُوضَةٍ فَرِهَنْ كَاتِبَاتٍ تَجِدُوا أَوْلَمْ سَفَرٍ عَلَىٰ كُنْتُمْ وَإِنْ  
وَأَوْلَا رَبِّهِ وَاللَّهُ وَلِيَّتِي أَمْنَتَهُ أَوْ تَمْنَنَ الَّذِي فَلْيُؤَدِّ بَعْضًا بَعْضُكُمْ  
مَلُونِ بِمَا وَاللَّهُ قَلْبُهُ دَاءِثُمْ فَإِنَّهُ يَكْتُمُهَا وَمَنْ الشَّهَادَةُ تَكْتُمُ  
عَلَيْمُ تَع

*“jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpihutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang*

*menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”.*

(b) Hadist

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ . حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ ثَابِتٍ الْبَزَّازُ . حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (عَبْدِ الرَّحِيمِ) بْنِ دَاوُدَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ، الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبَرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ، لَا لِلْبَيْعِ.

*”Diriwayatkan oleh Hasan bin Ali al-Khallal. Diriwayatkan oleh Bisyr bin Tsabit al-Bazzar. Diriwayatkan oleh Nashr bin Qasim, dari ‘Abdir Rahman bin Daud, dari Shalih bin Shuhaib ra, dari ayahnya berkata: bahwa Rasulullah SAW bersabda: tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradah (muarabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga bukan untuk dijual (HR. Ibnu Majah)”.*

**b. Syarat dan Rukun Murabahah**

1. Rukun-Rukun Murabahah

*Murabahah* sebagai salah satu bentuk jual beli memiliki rukun yang harus dipenuhi, sehingga *murabahah* dapat dikatakan sah menurut syari’at dan rukun dari *murabahah* itu sendiri adalah sebagai berikut:

(a) *Bai’* (penjual)

Dalam hal ini penjual adalah supplier yakni pihak yang mempunyai barang yang dijadikan dalam transaksi.

(b) *Musytary Awal* (Pembeli Pertama)

Yang dimaksud dengan *Musytari Awal* adalah pihak bank yang akan melaksanakan transaksi dengan pembeli kedua (nasabah).

(c) *Musytary Sani* (Pembeli Kedua)

Pembeli kedua merupakan pihak yang memerlukan barang dan pihak yang akan menjadi pembeli dari pembeli pertama.

(d) *Ma'qud 'alayh* (Obyek Jual Beli)

Merupakan barang yang dibutuhkan oleh pembeli kedua dan barang yang akan dijadikan obyek dalam transaksi ini.

(e) *Shigat Ijab Qabul* (Ucapan Serah Terima)

Shigat ijab qabul merupakan perkataan serah terima dari penjual dan pembeli, dalam hal ini pihak bank dan nasabah dan ini merupakan inti dari semuanya.<sup>37</sup>

## 2. Syarat-syarat *Murabahah*

Yang dimaksud dengan syarat dalam jual beli *murabahah* ialah sesuatu yang menjadi sebab terealisasinya transaksi *murabahah*. Adapun syarat-syarat *murabahah* adalah:

- a) Penjual memberitahukan biaya modal kepada nasabah
- b) Kontrak pertama harus sesuai dengan rukun yang telah ditetapkan
- c) Kontrak harus bebas dari riba

<sup>37</sup>Dumairi Nor, dkk, *Ekonomi Syari'ah Versi Salaf*, (Sidogiri : Pustaka Sidogiri, 2007) h.

- d) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian
- e) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.

Pada dasarnya semua rukun dan syarat murabahah di atas dapat terealisasi jika barang atau produk yang telah dikuasai atau dimiliki oleh penjual pada waktu negosiasi dan kontrak. Apabila barang atau produk tidak dimiliki oleh penjual saat itu, maka sistem yang digunakan adalah murabahah kepada pemesan pembelian (*murabahah KPP*). Hal ini dinamakan demikian karena si penjual semata-mata mengadakan barang untuk memenuhi kebutuhan si pembeli yang memesannya.<sup>38</sup>

### 3. Macam-macam Pembiayaan Murabahah

Murabahah dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu:

#### a) Murabahah Tanpa Pesanan

Murabahah tanpa pesanan, maksudnya ada yang pesan atau tidak, ada yang beli atau tidak, Bank Syariah tetap menyediakan barang dagangannya. Penyediaan barang pada murabahah ini tidak terpengaruh atau terkait langsung ada tidaknya pesanan atau pembeli. Dalam murabahah tanpa pesanan, Bank Syariah menyediakan barang atau persediaan barang yang akan diperjualbelikan dilakukantanpa

---

<sup>38</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2004) h. 102-103

memperhatikan ada nasabah yang membeli atau tidak, sehingga proses pengadaan barang dilakukan sebelum transaksi jual beli murabahah dilakukan.

b) *Murabahah* Berdasarkan Pesanan

*Murabahah* berdasarkan pesanan, maksudnya Bank Syariah baru akan melakukan transaksi *murabahah* atau jual beli apabila ada nasabah yang memesan barang sehingga penyediaan barang baru dilakukan jika ada pesanan. Pada *murabahah* ini, pengadaan barang sangat tergantung atau terkait langsung dengan pesanan atau pembelian barang tersebut.<sup>39</sup> Dalam hal ini, penjual boleh meminta pembayaran *hamis gadiyah*, yakni uang tanda jadi ketika ijab qabul. Hal ini sekedar untuk menunjukkan bukti keseriusan si pembeli. Bila kemudian penjual telah membeli, sedangkan si pembeli membatalkannya karena tidak sesuai dengan pesanan awal, maka pembayaran *hamis gadiyah* dapat digunakan untuk menutup kerugian. Dan bila jumlahnya lebih kecil dari kerugian maka penjual dapat meminta kekurangannya. Sebaliknya, bila berlebih maka pembeli berhak atas kelebihan itu.<sup>40</sup> Jadi pemesan di dalam *murabahah* berdasarkan pesanan, bisa bersifat mengikat dan bisa bersifat tidak mengikat.

---

<sup>39</sup>Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, (Yogyakarta : UII Press, 2005), h. 37

<sup>40</sup>Adiwarman Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan* , (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 115



### c. Perubahan Dalam Akad Murabahah

#### 1) Ketentuan Umum *Murabahah* pada Bank Syariah

##### a) Jaminan

Pada dasarnya, jaminan bukanlah satu rukun atau syarat mutlak dipenuhi dalam murabahah, demikian juga dalam *murabahah* KPP. Jaminan dimaksudkan untuk menjaga agar si pemesan tidak main-main dengan pesanan. Si pembeli (penyedia pembiayaan/bank) dapat meminta kepada si pemesan (pemohon/nasabah) suatu jaminan (*rahn*) untuk dipegangnya. Dalam teknis operasionalnya, barang-barang yang dipesan dapat menjadi salah satu jaminan yang bisa diterima untuk pembayaran utang.

##### b) Hutang dalam Murabahah

Secara prinsip, penyelesaian hutang si pemesan dalam transaksi *murabahah* KPP tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan oleh si pemesan kepada pihak ketiga atas barang pesanan tersebut. Apakah si pemesan menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban menyelesaikan hutangnya kepada si pembeli. Jika pemesan

menjual barang tersebut sebelum masa angsurannya berakhir, ia wajib segera melunasi seluruh angsurannya. Seandainya 33 penjualan aset tersebut merugi, contohnya kalau nasabah adalah penjual juga, pemesan harus tetap menyelesaikan pinjamannya sesuai dengan kesepakatan awal. Hal ini karena transaksi penjualan kepada pihak ketiga yang dilakukan nasabah merupakan akad yang benar-benar terpisah dari akad *murabahah* pertama dengan bank.

c) Penundaan pembayaran oleh debitur mampu

Seorang nasabah yang mempunyai kemampuan ekonomis dilarang menunda penyelesaian hutangnya dalam *murabahah* ini. Bila seorang pemesan menunda penyelesaian hutang tersebut, pembeli dapat mengambil tindakan yaitu mengambil prosedur hukum untuk mendapatkan kembali hutang itu dan mengklaim kerugian finansial yang terjadi akibat penundaan.

d) Bangkrut

Jika pemesan yang berhutang dianggap pailit dan gagal menyelesaikan hutangnya karena benar-benar tidak mampu secara ekonomi dan bukan karena lalai sedangkan ia mampu. Kreditor harus menunda tagihan hutang sampai

ia menjadi sanggup kembali.<sup>41</sup> Dalam melakukan jual beli murabahah, bank Syariah harus memberitahukan secara jujur kepada pembeli (nasabah) tentang harga pokok barang terkait dengan biaya-biaya yang diperlukan. Hal tersebut jelas dan tegas tercantum dalam Fatwa DSN No. 04 / DSNMUI / IV / 2004 tentang murabahah.

e) *Manfaat Murabahah*

Jual beli murabahah mempunyai beberapa manfaat bagi para nasabah dan pihak bank sendiri, diantaranya:

1) Bagi nasabah

(a) Memperoleh modal yang dapat digunakan untuk membiayai usaha produknya, yaitu untuk memperkuat usaha yang telah ada atau untuk membentuk usaha baru.

(b) Memperoleh sarana produksi secara terus menerus (kontinu).

c) Meningkatkan pendapatan yang diperoleh akibat tambahan modal dalam usaha produktifnya.

2) Bagi lembaga (Bank Syariah)

(a) Merupakan sumber pembentukan kekayaan dan pendapatan yang dapat menjamin kelangsungan usaha perbankan Syariah.

---

<sup>41</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syaria'ah dari Teori ke Praktik*, ( Jakarta : Gema Insani Press, 2004), h. 105

(b) Memungkinkan bank Syariah untuk memiliki usaha produktif sesuai dengan kebutuhan nasabah.

**d. Berakhirnya Akad *Murabahah***

Lamanya kerja sama dalam akad *murabahah* tidak tentu dan tidak terbatas, tetapi semua pihak berhak untuk menentukan jangka waktu kontrak kerja yang sama dengan memberitahukan pihak lainnya. Namun akad *murabahah* dapat berakhir karena hal-hal sebagai berikut:

- 1) Dalam hal *murabahah* tersebut dibatasi waktunya, maka *murabahah* berakhir pada waktu yang telah ditentukan.
- 2) Salah satu pihak memutuskan mengundurkan diri.
- 3) Salah satu pihak meninggal dunia atau hilang akal.
- 4) Pengelola dana tidak menjalankan amanahnya sebagai pengelola usaha untuk mencapai tujuan sebagaimana dituangkan dalam akad. Sebagai pihak yang mengemban amanah ia harus beritikad baik dan hati-hati.
- 5) Modal usaha tidak ada.

**e. Wanprestasi**

Seseorang yang tidak melaksanakan atau tidak memenuhi prestasi yang merupakan kewajiban dalam suatu kontrak yang telah diadakannya, maka seseorang tersebut dikatakan melakukan wanprestasi. Apabila seorang debitur tidak melakukan prestasi sama sekali atau melakukan prestasi yang keliru atau terlambat

melakukan wanprestasi, maka dalam hal demikian inilah seorang debitur dikatakan melakukan wanprestasi.

Menurut Subekti, wanprestasi seorang debitur dapat berupa empat macam yaitu:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya
- b. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya

Seorang debitur dikatakan wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian tergantung dari kontrak yang diadakannya. Apabila dalam kontrak yang diadakan ditentukan tenggang waktu pelaksanaan kontrak, maka menurut ketentuan pasal 1238 KUH Perdata, bahwa debitur dianggap melakukan wanprestasi dengan lewatnya waktu yang telah ditentukan. Jika waktu tidak ditentukan, maka untuk adanya wanprestasi tersebut perlu diberitahukan kepada debitur, berupa peringatan tertulis berupa surat perintah atau kata sejenis itu.

Peringatan dan pemberitahuan yang diberikan kepada debitur merupakan upaya awal yang dapat dilakukan kreditor terhadap debitor. Dalam hal ini, upaya yang dilakukan merupakan upaya untuk mengingatkan kreditor akan kewajibannya. Jika



melalui tahap ini debitor telah menyadari kelalaiannya, maka tidak diperlukan lagi upaya lebih lanjut.

Ganti rugi yang dapat dituntut atas dasar wanprestasi dapat berupa biaya, rugi, dan bunga yang dalam bahasa Belanda disebut *konsten, schaden en enteresten*. Biaya atau *konsten* adalah segala pengeluaran atau biaya konkret yang telah dikeluarkan. Rugi atau *schader* yaitu kerugian yang sungguh-sungguh menimpa harta benda kepunyaan kreditur, sedangkan *interesten* adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang akan diperoleh seandainya pihak debitur tidak lalai.

### 3. *Tahawwul Al-Aqd* dan Cicilan/Kredit Dalam Hukum Islam

Fatwa DSN MUI No: 47/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penyelesaian Piutang *Murabahah* Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar<sup>42</sup>.

#### a) Pengertian *Tahawwul Al-Aqd*

Pengertian *Tahawwul Al-Aqd* adalah perubahan sesuatu dari segi dzatnya, caranya, tempatnya, waktunya, dan hukumnya. Dengan demikian, *tahawwul al-aqd* berarti perubahan akad dari akad formal (tertulis) menjadi akad lain yang tidak tertulis, karena akad tertulis tersebut tidak terpenuhi rukun atau syaratnya, atau tidak sesuai dengan kedudukan/lesejatiannya.

---

<sup>42</sup> Fatwa DSN MUI No: 47/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penyelesaian Piutang *Murabahah* Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar

b) Pertimbangan Munculnya Fatwa

- 1) Bahwa sistem pembayaran dalam akad *murabahah* pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) paa umumnya dilakukan secara cicilan dalam kurun waktu yang telah disepakati antara LKS dengan nasabah.
- 2) Bahwa dalam hal nasabah tidak mampu membayar, maka diselesaikan sesuain dengan prinsim-prinsip syariah isalm.
- 3) Bahwa untuk memastikan hukum tentang masalah tersebut menurut syariah islam, Dewan Syariah Nasional memandang perlu mrnrapkan Fatwa untuk menjadi pedoman.

c) Dasar Hukum

1) Firman Allah SWT:

- a) QS. al-Baqarah [2]: 275
- b) QS. al-Nisa' [4]: 29
- c) QS. al-Ma'idah [5]: 1
- d) QS. al-Ma'idah [5]: 2
- e) QS. al-Baqarah [2]: 280

2) Hadist Nabi SAW:

- a) Hadist Nabi riwayat Al-Thabrani dan Ibnu Majah dan di-shahih- kan oleh Ibnu Hibban: Dari Abu Sa'id Al-Khudari bahwa Rasulullah saw. Bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu hanya boleh dilakukan dengan kerelaan dua belah pihak."

b) Hadist Nabi riwayat Al-Thabrani dalam Al-Kabir dan Al-Hakim dalam Al-Mustadrak yang menyatakan bahwa hadist ini shahih sanadnya: Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Nabi SAW. Ketika beliau memerintahkan untuk mengusir Bani Nadhir, datanglah beberapa dari mereka seraya mengatakan: “Wahai Nabiyallah”.

Sesungguhnya Engkau telah memerintahkan untuk mengusir kami sementara kami mempunyai piutang pada orang-orang yang belum jatuh tempo.” Maka Rasulullah saw berkata: “Berilah keringanan dan tagihlah lebih cepat.”

3) Hadist Nabi riwayat Muslim: “Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kseulitannya di hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya.”

4) Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bi ‘Auf: “Perjanjian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terkait dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang haal atau menghalalkan yang haram.

5) Kaidah fiqh “Segala sesuatu pada dasarnya boleh, kecuali bila ada dalil yang mengharamkannya.”

6) “Kesulitan dapat mendatangkan kemudahan.

#### 4. Restrukturisasi Pembiayaan

##### 1. Pengertian Restrukturisasi.

Restrukturisasi adalah upaya perbaikan yang dilakukan dalam kegiatan pembiayaan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.<sup>43</sup>

##### 2. Tujuan Restrukturisasi.

- a. Untuk menghindarkan kerugian bagi bank karena bank harus menjaga kualitas pembiayaan yang telah diberikan.
- b. Untuk membantu memperingan kewajiban debitur sehingga dengan keringanan ini debitur mempunyai kemampuan untuk melanjutkan kembali usahanya dan dengan menghidupkan kembali usahanya akan memperoleh pendapatan yang sebagian dapat digunakan untuk membayar hutangnya dan sebagian untuk melanjutkan kegiatan usahanya.
- c. Dengan restrukturisasi maka penyelesaian pembiayaan melalui lembaga-lembaga hukum dapat dihindarkan karena penyelesaian melalui lembaga hukum dalam prakteknya memerlukan waktu, biaya dan tenaga yang tidak sedikit dan hasilnya lebih rendah dari pihutang yang ditagih.<sup>44</sup>

##### 3. Bentuk penyelamatan pembiayaan

- a. Penjadwalan Kembali (*rescheduling*)

<sup>43</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Restrukturisasi\\_Kredit](http://id.wikipedia.org/wiki/Restrukturisasi_Kredit).

<sup>44</sup> Sutarno, *Aspek-Aspek, Hukum Perkreditan Bank*, (Bandung : CV Alfabeta, 2003), h.

Adalah suatu upaya untuk melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian pembiayaan berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali atau jangka waktu pembiayaan termasuk tenggang (*grace period*), termasuk perubahan jumlah angsuran.

b. Persyaratan Kembali (*reconditioning*)

Adalah melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh persyaratan perjanjian, yang tidak terbatas hanya pada perubahan jadwal angsuran, dan atau jangka waktu pembiayaan saja. Tetapi perubahan pembiayaan tersebut tanpa memberikan tambahan pembiayaan atau tanpa melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari pembiayaan menjadi *equity* perusahaan.

a. Penataan Kembali (*restructuring*)

Adalah upaya untuk melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian pembiayaan berupa pemberian tambahan pembiayaan, atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian pembiayaan menjadi perusahaan, yang dilakukan dengan atau tanpa rescheduling dan atau *reconditioning*.<sup>45</sup>

4. Fasilitas atau kebijakan yang dapat digunakan untuk melakukan restrukturisasi pembiayaan bermasalah<sup>46</sup>.

a. Penurunan suku bunga

Penurunan suku bunga pembiayaan merupakan salah satu bentuk restrukturisasi yang bertujuan untuk memberikan

---

<sup>45</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2005), h. 71

<sup>46</sup> Ibid h. 71

keringanan kepada debitur sehingga dengan penurunan suku bunga pembiayaan besarnya bunga yang harus dibayar debitur setiap tanggal pembayaran menjadi lebih kecil dibanding suku bunga yang ditetapkan sebelumnya. Misalnya bunga pembiayaan yang ditetapkan dalam perjanjian pembiayaan sebelumnya pertahun 20% diturunkan menjadi 15%. Dengan adanya keringanan suku bunga maka pembayaran bunga setiap bulannya menjadi lebih kecil sehingga pendapatan dari hasil usaha debitur dapat dialokasikan untuk membayar sebagian pokok dan sebagian lainnya untuk melanjutkan dan mengembangkan usaha. Dengan demikian dalam jangka waktu tertentu sesuai perhitungan *cash flow* atas usaha debitur dapat diprediksi akan mampu menyelesaikan seluruh hutang dan usaha dapat berkembang kembali.

b. Pengurangan tunggakan bunga pembiayaan

Untuk menyelamatkan pembiayaan bermasalah restrukturisasi pembiayaan dapat dilakukan dengan memperingan beban debitur dengan cara mengurangi tunggakan bunga pembiayaan atau menghapus seluruhnya tunggakan bunga pembiayaan. Debitur dibebaskan dari kewajiban membayar tunggakan bunga pembiayaan sebagian atau seluruhnya. Langkah penyelamatan dengan menghapus sebagian atau seluruh tunggakan bunga pembiayaan diharapkan



debitur memiliki kemampuan kembali untuk melanjutkan usahanya sehingga menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untuk membayar hutang pokoknya yang tidak mungkin dihapus seluruhnya oleh kreditur atau bank.

c. Pengurangan tunggakan pokok pembiayaan

Sejumlah pinjaman uang yang diberikan oleh kreditur/bank kepada debitur inilah yang disebut pokok pembiayaan yang harus dibayar kembali oleh debitur sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian pembiayaan. Pengurangan tunggakan pokok pembiayaan merupakan restrukturisasi yang paling maksimal diberikan oleh bank kepada debitur karena pengurangan tunggakan pokok pembiayaan biasanya diikuti dengan penghapusan bunga dan denda seluruhnya. Pengurangan tunggakan pokok pembiayaan ini merupakan pengorbanan bank yang sangat besar karena asset bank yang berupa hutang pokok ini tidak kembali dan merupakan kerugian yang menjadi beban bank.

d. Perpanjangan jangka waktu pembiayaan

Perpanjangan jangka waktu pembiayaan merupakan bentuk restrukturisasi pembiayaan yang bertujuan memperingan debitur untuk mengembalikan hutangnya. Misalnya hutang seluruhnya yang seharusnya dikembalikan

selambat-lambatnya pada bulan januari 2003 diperpanjang menjadi januari 2005.

e. Penambahan fasilitas pembiayaan

Penambahan fasilitas pembiayaan diharapkan usaha debitur akan berjalan kembali dan berkembang, yang akan menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untuk mengembalikan hutang lama dan tambahan fasilitas baru. Untuk memberikan tambahan fasilitas pembiayaan harus dilakukan analisa yang cermat, akurat dan dengan perhitungan yang tepat mengenai prospek usaha debitur karena debitur menanggung hutang lama dan hutang baru. Usaha debitur harus mampu menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untuk melunasi hutang lama dan tambahan pembiayaan baru dan masih mampu mengembangkan usaha ke depan.

f. Pengambil alihan agunan atau asset debitur

Pengambil alihan agunan atau asset debitur dalam hukum dapat disebut kompensasi atau penjumpaan hutang. Untuk menyelamatkan kredit dengan cara ini bank/kreditur mengambil alih agunan atau asset debitur yang nilai jaminan tersebut dikompensasikan dengan jumlah pembiayaan sebesar nilai agunan yang diambil, maka terjadilah kompensasi. Dengan kata lain agunan kredit yang diambil alih bank dibayar dengan menggunakan kredit tertunggak. Dengan demikian

agunan pembiayaan menjadi milik/asset bank dan hutang debitur dinyatakan lunas.

- g. Konversi pembiayaan menjadi modal sementara dan pemilikan saham

Konversi pembiayaan menjadi modal dalam perusahaan debitur merupakan salah satu bentuk restrukturisasi pembiayaan yang artinya sejumlah nilai pembiayaan dikonversikan menjadi saham pada perusahaan debitur. Mengenai berapa besarnya nilai saham yang berasal dari konversi pembiayaan tergantung hasil kesepakatan kreditur dan debitur. Dengan demikian bank memiliki sejumlah saham pada perusahaan debitur dan hutang debitur menjadi lunas. Berapa jumlah saham yang dimiliki bank tergantung hasil penilaian berapa nilai saham yang disepakati.<sup>47</sup>

Dalam perbankan, restrukturisasi pembiayaan hanya dapat dilakukan terhadap debitur yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- (1) Debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok atau bunga pembiayaan;
- (2) Debitur memiliki prospek usaha yang baik dan mampu untuk memenuhi kewajiban setelah pembiayaan direstrukturisasi.

---

<sup>47</sup>Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Bank*, (Bandung : CV Alfabeta, 2003), h. 267

Sedangkan bank dilarang melakukan restrukturisasi pembiayaan dengan tujuan hanya untuk menghindari:

- (1) Penurunan penggolongan kualitas pembiayaan
- (2) Peningkatan pembentukan penyisihan penghapusan aktiva (PPA)
- (3) Penghentian pengakuan pendapatan bunga secara aktual.

## B. Tinjauan Pustaka

Setelah peneliti melakukan telaah terhadap beberapa penelitian, ada beberapa yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan diantaranya sebagai berikut :

1. Penelitian Muhammad Fahri Zaini dari IAIN Kota Metro Tahun 2015 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kasus Wanprestasi Dalam Akad Pembiayaan *Murabahah* di Bank Syariah Sragen” tujuan dari penelitian ini adalah penyelesaian kasus wanprestasi atas permasalahan yang dirumuskan dan sesuai dengan tujuan yang berkaitan dengan penyelesaian wanprestasi pembiayaan *murabahah* di Bank Syariah Sragen dengan berbagai cara penyelesaian yang dapat menyelesaikan wanprestasi pembiayaan *murabahah* secara musyawarah kekeluargaan, administrative, dengan melalui (*rescheduling, reconditioning, restructuring*) dan penyelesaian perselisihan akibat wanprestasi pembiayaan *murabahah* dilakukan di Pengadilan Agama. Tinjauan menyelesaikan kasus wanprestasi menurut Fatwa DSN-MUI NO. 47/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penyelesaian

Pihutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar maka mempunyai beberapa ketentuan LKS ( Lembaga Keuangan Syariah) boleh melakukan penyelesaian murabahah bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan atau melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan objek *murabahah* atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah melunasi sisa hutangnya kepada LKS dari hasil penjualan. Apabila hasil penjualan melebihi sisa hutang maka LKS mengembalikan sisanya kepada nasabah, apabila nasabah tidak mampu membayar sisa hutangnya, maka LKS dapat membebaskannya<sup>48</sup>.

2. Penelitian Fadilah dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2017 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme *Rescheduling* Pada Pembiayaan *Murabahah* di Bank Bukopin Syariah Cabang Semarang” tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan tentang apakah pembiayaan *murabahah* dapat dijadwal kembali (*rescheduling*) di Bank Bukopin Cabang Semarang, kemudian bagaimana bentuk akad *rescheduling* pada pembiayaan *murabahah* di Bank Bukopin Syariah Cabang Semarang, dan bagaimana tinjauan hokum Islam terhadap pembiayaan akad *rescheduling* pada pembiayaan *murabahah* di Bank Bukopin Syariah Cabang Semarang. Adapun hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa pembiayaan *murabahah* di Bank Bukopin Syariah Cabang Semarang direstrukturisasi dengan cara penjadwalan kembali (*rescheduling*).

---

<sup>48</sup> Muhammad Fahri Zaini, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kasus Wanprestasi Dalam Akad Pembiayaan *Murabahah* di Bank Syariah Sragen (Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Kota Metro, 2015).

Maka penelitian tersebut dapat menyimpulkan bahwa pembiayaan *murabahah* di Bank Bukopin Syariah Cabang Semarang bisa di restrukturisasi melalui penjadwalan kembali (*rescheduling*). Adapun bentuk akadnya tetap menggunakan akad *murabahah* yaitu pihak bank tidak merubah akad hanya memperbarui akad yang lama dengan akad yang baru karena nasabah hanya meminta perpanjangan jangka waktu dan perubahan jumlah cicilan atau angsuran untuk pelunasan pembiayaan *murabahah* tanpa menambah jumlah pembiayaannya, tinjauan hukum Islam terhadap pembiayaan akad *rescheduling* pada pembiayaan *murabahah* di Bank Bukopin Syariah Cabang Semarang diperbolehkan karena sesuai dengan QS. Al-Baqarah (2) ayat 280 dan selaras dengan fatwa DSN No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali tagihan *murabahah*<sup>49</sup>.

3. Penelitian Asri Andini dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2018 yang berjudul “Penerapan *Rescheduling* Pada Pembiayaan Modal Kerja Bermasalah Dengan Akad *Murabahah* (Studi Kasus Pada Pt. Bprs Bandar Lampung)” Tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui dan menggambarkan mengenai pelaksanaan *rescheduling* di BPRS Bandar Lampung, untuk mengetahui kesesuaian *rescheduling* di BPRS Bandar Lampung dengan perspektif ekonomi Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme *rescheduling* di BPRS Bandar Lampung dilakukan dengan cara

---

<sup>49</sup> Fadilah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme *Rescheduling* Pada Pembiayaan *Murabahah* di Bank Bukopin Syariah Cabang Semarang (Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017)



memberikan perpanjangan jangka waktu pembiayaan, sisa pokok yang ada pada nasabah dijadikan pembiayaan baru sesuai dengan nilai angsuran kemampuan bayar nasabah. Penerapan *rescheduling* dalam perspektif ekonomi Islam di BPRS Bandar Lampung telah sesuai dengan prinsip-prinsip dasar ekonomi, Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 280, dan fatwa DSN No. 48/ DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali tagihan *murabahah*. Penyelesaian pembiayaan melalui jalur hukum apabila nasabah dalam keadaan tidak ada itikad baik. Berdasarkan hal ini BPRS Bandar Lampung telah sesuai dengan PBI No. 13/9/PBI/2011 tentang restrukturisasi pembiayaan bermasalah.<sup>50</sup>




---

<sup>50</sup> Asri Andini. Penerapan Rescheduling Pada Pembiayaan Modal Kerja Bermasalah Dengan Akad *Murabahah* (Studi Kasus Pada Pt. Bprs Bandar Lampung), (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018).

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2012.
- Abdul Qodir Zaelani, *Bunga Bank dalam Perspektif Sisio-Ekonomi dan Ushul Fiqh (Studi atas Pemikiran M. Umer Chapra)*, Jurnal Asas, 2009, Vol. 4, No. 2, h. 8.  
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1678/1399>.
- Ahmad Ifam Sholihin. *Buku Pintar Ekonomi Syaria*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Al Iman Abi Zakariya Yahya Ibnu Sarf An Nawawi Al Dhamasqi, *Syarah Shahih Muslim Juz 17*, Mesir: Al Makhtabah Al Thaufiqiya, 2008.
- Ali Sholihin, wawancara dengan penulis, Bandar Lampung, 10 April 2020.
- Andi Cahyono, wawancara dengan penulis, Bandar Lampung, 06 April 2020.
- Arsip Laporan Pengurus KSPP BMT Fajar, 2015.
- Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Burhanudin, *Koperasi Syariah Dan Pengaturannya Di Indonesia*, Jakarta: UIN Malik Press, 2013.
- Cholid Narbuko Dan Abu Achmad. *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara Cet.8, 2007.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: Gramedia, 2011.
- Erna Emawati. *Pemberdayaan Dan Refleksi Finansial Usaha Kecil Indonesia*, Bandung: Yayasan Akatiga, 1997.
- Faturrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Fitri Nurhartati, Ika Saniyati Rahmanyah, *Koperasi Syariah*, Surakarta: PT Era Adicitra Intermedia, 2012.
- Hairudin, wawancara dengan penulis, Bandar Lampung, 13 April 2020.
- Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Ekonesia, 2007.

- Hertanto Widodo. *Panduan Praktis Oprasional BMT*, Jakarta: Mizan, 1999.
- Khaerul Umam. *Manajemen Perbankan Syariah*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Lexy J. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, Cet XXI, 2005.
- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001.
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: PT Muhammad Yunus Wa Dzriyah, 2010.
- Maulana Hasanudin Dan Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyārah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Moh. Nazir. *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.
- Moh. Pabunda Tika. *Metodelogi Riset Bisnis*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006.
- Muhammad Fikri, wawancara dengan penulis, Bandar Lampung, 15 April 2020.
- Muhammad Sholahudin, *Lembaga Keuangan Dan Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Ombak Anggota IKAPI, 2014.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, Semarang: Tazkia, 1999.
- Nakhalul Ilmi SM, *Teori Dan Praktek Mikro Keuangan Syariah*, Yogyakarta: UUI Press, 2002.
- Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Oni Sahroni, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Praktista Ningsih, wawancara dengan penulis, Bandar Lampung, 12 April 2020.
- Radial. *Paradigma Dan Model Penelitian Komunikasi*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014.
- Rosady Ruslan. *Metode Penelitian Public Relations dan komunikasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Rozalinda, *Fiqih Ekonomi Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Shalah Ash-Shawl, *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2008.
- Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Ekonesia, 2007.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017.

Suharsimi Ari Kunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010.

Susiadi, *Metode Penelitian*, Lampung: Pusat penelitian dan penerbitan LP2M Insitut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.

Sutrisno Hadi, *Metode Research*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit, Fakultas Psikologi UGM, 1981.

Tim Penulis. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema. 2009.

Vhica Penida, wawancara dengan penulis, Bandar Lampung, 14 April 2020.

Winarno Surachmad, *Dasar dan Teknik Research: Pengantar Metodologi Ilmiah*, Bandung: Penerbit Tarsito, 1972.